



KOMISI C USUL BENTUK POKJA LEGISLATIF-EKSEKUTIF

Komitmen Bersama Percepat Penuntasan Sampah

YOGYA (KR) - Legislatif dan eksekutif memiliki komitmen bersama untuk mempercepat penuntasan sampah di Kota Yogya. Komisi C DPRD Kota Yogya pun mengusulkan dibentuk kelompok kerja (pokja) guna mempermudah proses komunikasi dan pengawasan agar sesuai target.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi C DPRD Kota Yogya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya di gedung dewan, Selasa (7/1). "Tadi sudah dipaparkan skema penanganan sampah berikut targetnya pada tahun ini. Makanya kami coba mengusulkan ada pokja dari unsur legislatif dan eksekutif agar target yang sudah dicanangkan bisa tercapai," ungkap Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya Bambang Seno Baskoro.

Menurut Bambang, pokja tersebut sebagai media komunikasi bersama agar setiap persoalan bisa segera tersampaikan serta dicarikan solusinya. Selain itu, pokja itu juga menjadi wadah bagi lembaga legislatif dalam mengawasi ki-

nerja eksekutif sesuai dengan skema yang sudah dicanangkan. Melalui pokja itu pula kalangan dewan akan lebih mudah mengawal harapan masyarakat perihal masalah sampah. "Masyarakat itu kan harapannya sampah di rumahnya bisa rutin diambil seperti dulu. Tidak ada lagi tumpukan sampah baik di depo, TPS maupun pinggir-pinggir jalan. Tetapi kan butuh kepastian kapan itu bisa dituntaskan seperti dulu," tandasnya.

Selain masalah pokja, lembaga dewan juga mengusulkan setiap depo dan TPS di Kota Yogya menjadi humanis. Hal ini agar masyarakat tidak lagi harus menutup hidung atau bahkan membuang muka ketika melewati depo dan TPS di wilayahnya. Depo dan TPS humanis tersebut dicirikan tidak berbau, terlihat

menarik serta ada ruang pemilahan untuk jenis sampah organik, anorganik dan limbah B3. Sehingga setidaknya terdapat ruang penampung lindi yang higienis.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogya Ahmad Haryoko, mendukung jika ada pokja bersama legislatif dan eksekutif. Menurutnya persoalan sampah sangat dinamis serta memiliki pendekatan teknis yang berbeda. Keberadaan pokja bisa mempermudah akses informasi dan komunikasi agar langsung tersampaikan dengan mitra legislatif. "Setiap hari itu kan sampah terproduksi. Saat itu juga dinamika sering terjadi. Kalau ada pokja bisa jadi tidak perlu menunggu ada agenda rapat karena bisa langsung terinformasikan," jelasnya.

Terkait skema penanganan sampah, saat ini sedang dilakukan mapping transporter atau petugas pengangkut sampah dari rumah tangga yang akan terhubung ke tiap depo. Januari terdapat dua kemantren yang dijadikan mapping,

Kemudian Februari lima kemantren, dan Maret tujuh kemantren. Dengan begitu, memasuki April seluruh kemantren sudah transporter yang akan rutin mengambil sampah dari rumah tangga untuk disetorkan ke depo. Transporter tersebut juga dibekali kartu identitas dan terkoneksi dengan depo.

Haryoko menjelaskan, sebelum ada pembatasan sampah di depo jumlah transporter atau penggerobak mencapai 550 hingga 600 orang. Pihaknya saat ini tengah mengupayakan agar seluruh transporter dapat kembali aktif bahkan bisa menjadi pekerjaan utama. Hal ini karena selain mengangkut sampah rumah tangga mereka kelak akan berpotensi menjadi mitra DLH sebagai petugas pemungut retribusi. "Jadi ada dua tugas yakni mendistribusikan sampah dari wilayah ke depo serta memungut retribusi di tiap rumah tangga. Terutama ketika nanti regulasi terkait retribusi sudah direvisi. Kalau selama ini kan kita yang door to door," urainya.

Sementara terkait skema pengelolaan sampah, pihaknya juga menargetkan

pada April seluruhnya sudah bisa terkelola. Volume sampah saat ini mencapai 245 ton perhari. Pengelolaan dengan insinerator di Giwangan mampu mengolah hingga 30 ton per hari. Kemudian di Stimulyo melalui insinerator juga 30 ton per hari dan RDF 25 ton per hari. Sedangkan di TPS Kranon 25 ton per hari, dan TPS Karangmiri 15 ton per hari. Di samping itu masih ada 45 ton per hari yang dikelola dengan sistem kerja sama pihak swasta.

Dengan begitu masih ada sekitar 20 ton per hari yang belum mampu terkelola. Puluhan ton itu pun setiap hari menumpuk di depo dan hanya menunggu waktu pengelolaan. Akan tetapi melalui APBD 2025 ini Pemkot Yogya sudah mengalokasikan pengadaan tiga alat insinerator yang kelak akan ditempatkan di Stimulyo.

"Tiga alat itu sudah dalam proses pengadaan dan rencananya sudah bisa diujicobakan pada Maret besok. Sehingga April memang target sampah tertangani," jelasnya. (Dhi-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005